

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi suatu negara, sehingga sangat di perlukan bagi organisasi-organisasi pendukung lainnya yang bergerak di bidang pendidikan. Salah satu bentuk organisasi yaitu yayasan pendidikan. Pada dasarnya yayasan bukanlah suatu istilah yang asing di dengar oleh masyarakat saat ini.

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 16 tahun 2001 tentang yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang di pisahkan dan di peruntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Menurut Setiawan (2012:201) masyarakat cenderung memilih bentuk yayasan karena proses pendiriannya sederhana, tanpa memerlukan pengesahan dari pemerintah, serta persepsi masyarakat bahwa yayasan bukan merupakan subjek pajak. Kegiatan-kegiatan yang pada umumnya di lakukan oleh yayasan antara lain adalah memberikan santunan kepada anak yatim piatu, memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, kepada orang-orang yang sedang menderita suatu penyakit, memberikan beasiswa kepada anak yang berasal dari golongan tidak mampu, memberikan bantuan kepada korban bencana, mendirikan sekolah-sekolah dan lain sebagainya.

Yayasan pendidikan merupakan salah satu badan nonlaba di Indonesia, yayasan pendidikan di bedakan menjadi dua yaitu bergerak di bidang pendidikan

formal dan sektor pendidikan non formal. Secara garis besar tujuan organisasi lembaga pendidikan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : memperoleh laba (bisnis) dan yang lainnya adalah nonlaba, baik lembaga pendidikan swasta maupun yang didirikan oleh pemerintah.

Yayasan pendidikan dalam mendirikan sekolah harus menggunakan dana secara efektif dan efisien mungkin demi meningkatkan dan pelayanan kualitas pendidikan sekolah. Sebagaimana halnya organisasi lain, organisasi nonlaba seperti yayasan juga membutuhkan jasa akuntansi, baik untuk menghasilkan informasi keuangan maupun untuk meningkatkan mutu pengawasan yayasan yang bersangkutan. Hal ini memunculkan suatu ilmu akuntansi baru yang saat ini dikenal oleh masyarakat sebagai akuntansi sektor publik. Pelaporan keuangan di sektor pendidikan dimaksudkan untuk menyajikan dan mengungkapkan secara penuh aktivitas lembaga pendidikan termasuk unit-unit di dalamnya dan sumber daya ekonomi. Yayasan pendidikan tersebut untuk bertanggungjawab sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi serta sebagai informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan serta memudahkan pengendalian yang efektif.

Pada organisasi nonlaba cenderung tidak ada suatu kepemilikan organisasi yang mutlak, karena biasanya organisasi nonlaba ini didirikan oleh beberapa orang maupun kelompok. Sumber daya untuk mendirikan organisasi nonlaba ini juga bisa didapatkan melalui hutang. Sedangkan untuk kebutuhan operasionalnya bisa didapatkan dari pendapatan atau jasa yang diberikan. Namun hal ini

berakibat pengukuran jumlah dan kepastian arus kas masuk menjadi ukuran yang penting bagi para pemakai dari laporan keuangan yayasan tersebut.

Pedoman penyajian laporan keuangan untuk otoritas nonlaba adalah ISAK No. 35 yang telah di sahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada tanggal 28 September 2018 yang menjelaskan bahwa penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba. Laporan keuangan organisasi nonlaba meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan, dan catatan atas laporan keuangan.

Yayasan pendidikan HKBP Sidorame Medan adalah yayasan yang bergerak dibidang pendidikan yang beralamat di Jl.Dorawati No.40.Yayasan ini adalah organisasi nonlaba yang menyediakan keuangan untuk kepentingan manajemen yayasan dan masyarakat pengguna jasanya dan pemerintah. Oleh sebab itu laporan keuangan yang disusun berdasarkan ISAK 35 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nonlaba. Yayasan Pendidikan HKBP Sidorame menggunakan dasar konsep akrual (accrual basis). Berdasarkan informasi yang diperoleh , proses akuntansi pada Yayasan Pendidikan HKBP Sidorame pada saat pencatatan transaksi dimulai dengan melakukan pencatatan terhadap transaksi- transaksi keuangan yang terjadi ke dalam buku catatan harian yang terdiri dari pencatatan uang masuk dan pencatata uang keluar.

Sumber Penerimaan dana Yayasan Pendidikan HKBP Sidorame berasal dari pemerintah yaitu Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan pendanaan dari siswa yang disebut Sumber Pembinaan Pendidikan (SPP).

Berdasarkan data yang diperoleh, proses akuntansi pada Yayasan Pendidikan HKBP Sidorame dimulai dengan melakukan pencatatan terhadap transaksi-transaksi keuangan yang dicatat terpisah berdasarkan uang masuk yang diterima. Uang masuk yang diperoleh Yayasan Pendidikan HKBP Sidorame berasal dari SPP siswa dan juga Bantuan Dana Operasional Sekolah (BOS) yang nantinya akan dipergunakan untuk keperluan yayasan. Untuk uang masuk yang diterima dari SPP diperoleh dari iuran wajib siswa disetiap bulannya. Yayasan melakukan pencatatan SPP kedalam buku catatan harian berdasarkan nama siswa yang membayar. Pencatatan Pembayaran SPP Yayasan Pendidikan HKBP Sidorame ditetapkan tanggal pembayaran 1 sampai 10 dalam setiap bulannya dan pembayaran secara tunai dan non tunai. Dan ketika lewat pembayaran tgl yang ditetapkan maka siswa tersebut akan dikenakan denda.

Ada beberapa fenomena yang ditemui peneliti yang berkaitan dengan akuntansi keuangan pada Yayasan Pendidikan HKBP Sidorame diantaranya yaitu proses pembayaran SPP yang tidak tepat waktu sehingga pihak yayasan menetapkan denda bagi yang tidak tepat waktu hal ini mengakibatkan terjadinya keterlambatan pencatatan laporan keuangan setiap tahunnya. Selain itu, dalam pembayaran SPP pihak Yayasan menetapkan pembayaran tunai namun ada beberapa siswa yang melakukan pembayaran SPP melalui transfer yang mana hal

tersebut membuat pihak Yayasan Pendidikan HKBP Sidorame mengalami kesulitan dalam menyusun pencatatan keuangan.

Sehingga dalam kegiatan operasional keuangan yayasan pendidikan tersebut belum sesuai dengan ketentuan yang seharusnya dilakukan dengan konsep ISAK 35, didalamnya terdapat lima (5) jenis laporan keuangan, yang terdiri atas Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Penghasilan Komprehensif, Laporan Perubahan Aset Neto, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Sesuai dengan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana penerapan ISAK NO.35 sebagai pedoman dalam menyusun pelaporan keuangan yayasan pendidikan. Oleh Karena itu, penulis mengambil judul “**ANALISIS PENERAPAN AKUTANSI KEUANGAN PADA YAYASAN PENDIDIKAN HKBP SIDORAME MEDAN “**

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan langkah awal yang dilakukan karena hasilnya akan menjadi penuntun bagi langkah-langkah selanjutnya. Hal ini dilakukan agar penelitian dapat terarah dan hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan sampai pada tahap pembahasan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah”**Bagaimana Analisis Penerapan Akutansi Keuangan Berdasarkan ISAK 35 Di Yayasan Pendidikan HKBP Sidorame?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yang diterapkan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan yayasan.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menghindari meluasnya permasalahan dalam penelitian maka perlu adanya batasan masalah ini adalah

Menetapkan ruang lingkungnya yaitu penelitian ini dilakukan di Yayasan Pendidikan HKBP Sidorame Medan yang berfokus mengenai Bagaimana Analisis Penerapan Akutansi Keuangan Pada Yayasan HKBP Sidorame Medan.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan tentang penerapan akutansi keuangan pada Yayasan Pendidikan HKBP Sidorame Medan
- b. Bagi pihak Yayasan Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbang saran dalam penyusunan laporan keuangan kedepannya serta dapat memudahkan pengambilan keputusan.
- c. Bagi Penulis lainnya, menjadi referensi bagi penelitian dan selanjutnya dan dapat menjadi acuan dalam penelitian pada judul yang terkait.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Yayasan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 atas perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.

Menurut Fendi Supriono (2015) yayasan merupakan badan hukum yang maksud dan tujuannya sangat mulia yaitu sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

Menurut Syaiful Bahri (2016) dalam kamus umumnya (Kamus Hukum dan Politik) menarik kesimpulan sebagai berikut:

Yayasan sebagai badan hukum dan akte yang didirikan untuk memeberikan bantuan untuk tujuan sosisal. Yayasan adalah suatu paguyuban atau badan yang pendirianya disahkan dengan akte hukum atau akte yang disahkan oleh notaris, dimana yayasan itu aktifitasnya bergerak di bidang sosial, misalnya mendrikan sesuatu atau sekolah .

Perundang –undangan yang ada pada waktu itu, tidak satupun yang membarikan rumusan yang mengenai defenisi yayasan, status hukum yayasan ,serta cara mendirikan yayasan. Berbeda dengan halnya di belanda, yang secara tegas di dalam undang –undangnya yang menyebutkan bahwa yayasan adalah badan hukum .

Walaupun tidak disebut secara tegas, yayasan di Indonesia telah diakui pula sebagai badan hukum. Pengakuan sebagai dasar hukum didasarkan pada kebiasaan dan yurisprudensi. Untuk diakui sehingga badan hukum, yayasan hanya perlu memenuhi syarat tertentu, yaitu 1) syarat material yang terdiri dari : harus ada suatu pemisahan harta kekayaan, adanya suatu tujuan , dan mempunyai suatu organisasi. 2) syarat formil yang harus dengan akta autentik.

Didalam praktek hukum yang berlaku di Indonesia, pada umumnya yayasan didirikan dengan akta notaris. Akta notaris ini ada didaftarkan pengadilan negeri, dan diumumkan dalam Berita Negara. Dengan demikian, yayasan dapat juga didirikan dengan akta dibawah tangan.

Setelah keluarnya UU Yayasan , secara otomatis penentuan status badan hukum yayasan harus mengikuti ketentuan yang ada di dalam UU Yayasan tersebut. Dalam UU Yayasan disebutkan bahwa yayasan memperoleh suatu badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Dari ketentuan UU yayasan dapat di simpulkan bahwa ada beberapa syarat pendirian ,yaitu (1) Didirikan oleh 1 (satu) orang atau lebih : (2) Ada kekayaan yang di pisahkan dari kekayaan pendirinya: (3) Harus dilakukan dengan akta notaris dan di buat dalam bahasa Indonesia : (4) Harus memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia : (5) Diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia : (6) Tidak boleh memakai nama yang telah di pakai secara sah oleh yayasan lain atau bertentangan dengan ketertipan umum dan/ atau kesusilaan : (7) Nama yayasan harus didahului dengan

kata “ Yayasan” Bagi yayasan yang belum terdaftar harus, melakukan pendaftaran terlebih dahulu, kemudian menyesuaikan dasar anggarannya.

Pendaftaran persyaratan merupakan suatu hal yang kontradiktif, karena justru didalam UU Yayasan No 16/2001 tidak ada kewajiban bagi yayasan yang harus didaftarkan setelah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Kewajiban yang dibebankan kepada yayasan setelah disahkan hanyalah kewajiban untuk mengumumkan dalam Berita Negara.

Seharusnya penekanan aturan peralihan hukum pada pendaftaran, melainkan pada syarat jumlah minimal kekayaan yang di miliki serta prospek kegiatan yayasan itu sendiri. Bagi yayasan yang tidak memenuhi syarat dan atau prospek kegiatan yayasan tidak mungkin untuk di kembangkan yayasan tersebut dapat dibubarkan. Dengan demikian kerugian yang mungkin timbul baik bagi organ yayasan maupun pihak ketiga dapat diminimalisir penggunaannya.

2.2 Akuntansi Yayasan

Akuntansi yayasan merupakan lembaga berbentuk yayasan bergerak dalam berbagai variasi bentuk kegiatan. Beberapa fokus ke kegiatan advokasi dan pendampingan masyarakat sedangkan yang lainnya terjun keimplementasi program untuk secara langsung menyelesaikan suatu isu yang berkembang . Sejalannya dengan perkembangan masyarakat yang semakin sudah berjalan baik. Di samping itu, *stakeholders* yayasan termasuk para donor, apalagi jika pendapatan yayasan dari publik, jelas memerlukan segala informasi tentang pengelolaan yayasan. Dengan demikian, pentingnya sistem keuangan yayasan karena terkait oleh.kebutuhan *stakeholdernya*.

Akuntansi sebagai salah satu untuk menghasilkan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota pengelola, kreditor, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi yayasan .

Pelaporan yang tepat waktu dan diikuti dengan kualitas informasi yang tinggi pada satu sisi dapat mendorong keterbukaan , pada sisi yang lain justru menjadi umpan balik kepada internal lembaga.

2.3 Dasar Hukum Yayasan

Dasar hukum yayasan adalah Undang – Undang No.28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan.

1. UU Yayasan No. 16 Tahun 2001

UU No. 16 Tahun 2001 ini di harapkan dapat mengatasi berbagai masalah mengenai yayasan dan menjadi dasar hukum yang kuat dalam mengatur yayasan di Indonesia. Namun dalam UU tersebut ternyata dalam perkembangan belum menampung seluruh kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap UU tersebut. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat.

2.UU Yayasan No. 28 Tahun 2004

UU No. 28 Tahun 2004 merupakan penyempurnaan dari UU No. 16 Tahun 2001, Undang – Undang ini di maksudkan untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta memberikan pemahaman yang benar pada masyarakat

mengenai yayasan, sehingga dapat mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Selain hukum kebiasaan, doktrin dan Yurisprudensi dan UU yayasan sebagai dasar hukum yayasan dalam hukum positif, masalah yayasan meskipun secara eksplisit tidak mencatumkan suatu rincian yang pasti sebagai dasar pijakan.

Berbeda halnya dengan di Belanda, yang secara tegas dalam undang – undang nya menyebutkan bahwa yayasan adalah badan hukum. Walaupun tidak disebutkan secara tegas, yayasan di Indonesia telah di akui pula sebagai badan hukum. Pengakuan sebagai badan hukum didasarkan pada kebiasaan dan Yurisprudensi. Untuk diakui sebagai badan hukum, yayasan hanya perlu memenuhi syarat tertentu, yaitu ;

1. Syarat materil yang terdiri dari : harus ada suatu pemisah harta kekayaan , adanya suatu tujuan , dan mempunyai suatu organisasi .
2. Syarat formil yaitu harus dengan akta autentik.

Didalam praktek hukum yang berlaku di Indonesia, pada umumnya yayasan didirikan dengan akta notaris. Akta notaris ini ada di daftarkan pengadilan negeri dan di umumkan dalam Berita Negara. Hal ini di karenakan tidak ada ketentuan yang mengaturnya sehingga masih bebas bentuk. Dengan demikian, yayasan dapat juga di didirikan dengan akta di bawah tangan .

Setelah keluarnya UU yayasan, secara otomatis penentuan status badan hukum yayasan harus mengikuti ketentuan yang ada dalam UU Yayasan tersebut. Dalam UU Yayasan disebutkan bahwa yayasan memperoleh status badan hukum

setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia . Dari ketentuan UU No. 28 Tahun 2008 dapat disimpulkan bahwa ada beberapa syarat pendirian yaitu :

- 1) Didirikan oleh 1 orang atau lebih
- 2) Ada kekayaan yang di pisahkan dari kekayaan pendirinya
- 3) Harus dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia
- 4) Harus memperoleh pengesahan menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
- 5) Diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
- 6) Tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh yayasan lain atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan
- 7) Nama yayasan harus didahului dengan kata “ Yayasan “.

Bagi yayasan belum terdaftar, harus melakukan pendaftaran lebih dahulu, kemudian menyesuaikan anggaran dasarnya. Persyaratan pendaftaran merupakan suatu hal yang kontradiktif, karena justru di dalam UU Yayasan No 16/2001 tidak ada kewajiban bagi yayasan yang baru untuk didaftarkan setelah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asai Manusia. Kewajiban yang dibebankan kepada yayasan setelah disahkan hanya kewajiban untuk mengumumkan dalam berita Negara. Seharusnya penekanan aturan peralihan bukan pada pendaftaran, melainkan pada syarat jumlah minimal kekayaan yang dimiliki serta prospek kegiatan yayasan itu sendiri.

Bagi yayasan yang tidak memenuhi syarat jumlah minimal kekayaan yang harus di miliki oleh yayasan dan atau prospek kegiatan yayasan tidak mungkin untuk dikembangkan, yayasan tersebut dapat dibubarkan. Dengan demikian

kerugian yang mungkin timbul baik bagi organisasi yayasan maupun dengan pihak ketiga dapat di minimalisir.

2.4 Akuntansi Pendidikan Dan Ruang Lingkupnya

2.4.1 Peran dan Fungsi Akuntansi dalam Lingkungan Dunia Pendidikan

Akuntansi memberikan informasi keuangan dalam menunjang proses pengambilan kebijakan. Peran dan fungsi akuntansi dalam dunia pendidikan adalah menyediakan informasi kualitatif, terutama yang bersifat keuangan, agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam entitas pendidikan.

Peran dan fungsi akuntansi dalam lingkungan dunia pendidikan :

Kepala sekolah : Kepala sekolah menggunakan akuntansi untuk menyusun perencanaan sekolah yang dipimpinya, mengevaluasi kemajuan yang dicapai dalam usaha mencapai tujuan dan melakukan tindakan – tindakan koreksi yang diperlukan .

Guru dan Karyawan : Guru dan Karyawan mewakili kelompok yang tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas dan institut pendidikan (sekolah) .

Orang Tua Siswa : Para orang tua siswa yang berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup institut pendidikan, terutama perjanjian jangka panjang dan tingkat ketergantungan sekolah .

Pemerintah: Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan aktivitas sekolah . Informasi dasar ini dibutuhkan untuk mengatur aktivitas sekolah, menetapkan kebijakan anggaran dan mendasari penyusunan anggaran untuk tahun- tahun berikutnya .

2.4.2 Sistem Akuntansi

Sistem akuntansi adalah kumpulan elemen yaitu formulir, jurnal, buku besar, buku pembantu, dan laporan keuangan yang akan digunakan oleh manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan .

Menurut Baridwan (2014) mengenai Sistem Akuntansi dari para ahli: Sistem Akuntansi adalah suatu formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur, dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data mengenai usaha suatu kesatuan ekonomis dengan tujuan untuk menghasilkan umpan balik untuk laporan-laporan yang diperlukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti pemegang saham, kreditur, dan lembaga-lembaga pemerintah untuk menilai hasil operasi perusahaan

Menurut Mulyadi (2016), Sistem Akuntansi adalah organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen dalam pengelolaan.

Untuk menghasilkan informasi akuntansi, diperlukan metode dan perangkat tertentu untuk mengolah data yang diperlukan. Dengan demikian, sistem akuntansi mengakomodasikan semua kegiatan keuangan lembaga mulai dari tahap awal.

Setelah transaksi keuangan didokumentasikan ,disusunlah cara transaksi tersebut diproses. Dalam hal ini, terkait dengan apa dan siapa yang memproses serta perangkat dan atau cara pemrosesan data- data agar dapat menghasilkan informasi keuangan. Dengan demikian, informasi keuangan merupakan produk dari bagian keuangan suatu lembaga.

2.4.3 Siklus Akuntansi

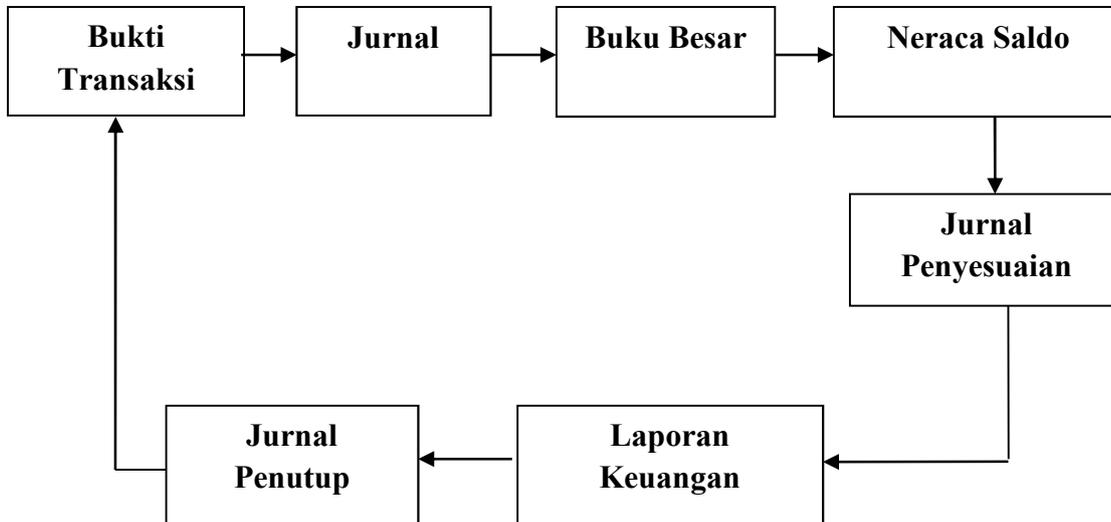
Siklus akuntansi merupakan suatu proses akuntansi sistematis dan bertahap yang dilakukan dengan tujuan untuk memproses berbagai bukti transaksi keuangan dan mengolahnya menjadi sebuah laporan atau informasi akuntansi pada sebuah entitas dalam suatu periode waktu tertentu.

Menurut pendapat Dina Fitria (2014) yang dimaksud dengan siklus akuntansi adalah sebuah tahapan kegiatan akuntansi yang meliputi pencatatan, pengelompokan, peringkasan data keuangan yang sudah diproses sebelumnya dan pelaporan yang dimulai saat terjadinya transaksi dalam sebuah entitas. .

Menurut Bahri Syaiful (2016) Siklus akuntansi adalah tahapan-tahapan mulai dari terjadinya transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan sehingga siap untuk pencatatan berikutnya. Kegiatan pencatatan akuntansi meliputi : 1. Pembuatan atau penerimaan bukti transaksi. 2. Pencatatan dalam jurnal (buku harian).

Sementara itu, Rahman Pura (2013) menjelaskan bahwa siklus akuntansi adalah rangkaian kegiatan dan tahapan akuntansi yang dilakukan secara sistematis mulai dari pencatatan akuntansi hingga penutupan pembukuan.

Gambar 2.1
Siklus Akutansi



Sumber : Dina Fitria (2014)

1. Bukti Transaksi

Bukti transaksi adalah dokumen sumber atau instrumen yang menandai bahwa transaksi yang sah terjadi. Jenis- jenis bukti transaksi yang biasanya digunakan adalah kuwitansi nota penjualan daftar gaji faktur dan sebagainya .

3. Jurnal

Jurnal atau buku harian adalah alat untuk mencatat trasanksi perusahaan yang di lakukan secara kronologis (berdasarkan urutan waktu terjadi) dengan menunjukkan rekening yang harus di debet dan dkredit beserta jumlah rupiahnya masing –masing .

4. Buku Besar

Buku besar adalah kumpulan dari rekening – rekening atau akun –akun yang digunakan dalam perusahaan atau entitas bisnis.

4. Neraca Saldo

Pada akhir periode akuntansi (biasanya triwulanan, bulanan, atau tahunan tergantung pada kebijakan perusahaan) Neraca saldo memuat ringkasan dari akun transaksi beserta saldonya yang berguna sebagai dasar untuk menyiapkan laporan keuangan atau sebagai bahan evaluasi.

5. Jurnal Penyesuaian

Pada akhir periode akuntansi perusahaan, jurnal penyesuaian harus diposting ke akun- akun tertentu pada akhir periode akuntansi agar sesuai dengan kondisi sebenarnya berdasarkan akuntansi akrual sehingga perusahaan dapat membuat laporan keuangan dengan tepat.

6. Laporan Keuangan

Laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas yang disusun menggunakan saldo yang sudah benar

7. Jurnal Penutup

Pada saat jurnal penutupan tersebut diposting semua akun nominal saldonya menjadi nol dan sudah siap digunakan untuk mencatat transaksi berjalan pada awal periode berikutnya.

2.5 Bentuk Laporan Keuangan Nonlaba

1. Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan menggambarkan aset (harta), liabilitas (kewajiban) dan aset neto. Dalam laporan, posisi keuangan kita bisa melihat saldo akhir dari nilai total aset, total kewajiban yang harus dipenuhi, serta total dari aset neto.

a) Laporan Posisi Keuangan (Format A)

Laporan posisi keuangan adalah bagian dari pelaporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu akhir periode. Tujuan pelaporan posisi keuangan entitas menyajikan informasi pengasilan komprehensif lain tersebut sesuai kelas aset netonya .

Tabel 2.1
Laporan Posisi Keuangan (Format A)

Entitas XYZ		
Laporan Posisi Keuangan		
Per 31 Desember 20x2		
(Dalam Rp)		
	20X2	20X1
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan setara kas	XXXX	XXXX
Piutang bunga	XXXX	XXXX
Investasi jangka panjang	XXXX	XXXX
Aset lancar lain	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
Total aset lancar	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
Aset tidak lancar		
Properti investasi	XXXX	XXXX
Investasi jangka panjang	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
Aset tetap	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
Total aset tidak lancar	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
TOTAL ASET	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
Liabilitas		
Liabilitas jangka pendek		
Pendapatan di terima dimuka	XXXX	XXXX
Utang jangka pendek	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
Total Liabilitas jangka pendek	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
Liabilitas jangka panjang		
Utang jangka panjang	XXXX	XXXX
Liabilitas imbalan kerja	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
Total liabilitas jangka panjang	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>

Tabel 2.2
Laporan Posisi Keuangan Format A (lanjutan)

TOTAL LIABILITAS	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
ASET NETO		
Tanpa Pembatasan (without Restrictions)		
Dari pemberi sumber Daya		
Surplus akumulasian	XXXX	XXXX
Penghasilan Komprehensif Lain **)	XXXX	XXXX
Dengan Pembatasan (without Restrictions)		
Dari pemberi sumber daya	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
TOTAL ASET NETO	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO	XXXX	XXXX

Sumber : (DE ISAK 35)

b) Laporan Posisi Keuangan (format B)

Pada laporan posisi keuangan format B mencakup jumlah penghasilan komprehensif lain tersebut sesuai dengan dengan kelas aset netonya. Misalnya , jika penghasilan komprehensif lain berasal dari aset neto dengan pembatasan , maka disajikan dalam kelas aset neto dengan pembatasan .

Tabel 2.3 Laporan Posisi Keuangan (Format B)

Entitas XYZ		
Laporan Posisi Keuangan		
Per 31 Desember 20x2		
(Dalam Rp)		
	20x1	20x2
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan setara kas	XXXX	XXXX
Piutang bunga	XXXX	XXXX
Investasi jangka pendek	XXXX	XXXX
Aset lancar lain	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
Total aset lancar	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
Aset tidak lancar	XXXX	XXXX

Tabel 2.4 Laporan Posisi Keuangan Format B (lanjutan)

Properti investasi	XXXX	XXXX
Investasi jangka panjang	XXXX	XXXX
Aset tetap	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
Total Aset Tidak Lancar	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
TOTAL ASET	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
LIABILITAS		
Liabilitas jangka pendek		
Pendapatan diterima dimuka	XXXX	XXXX
Utang jangka pendek	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
Total Liabilitas jangka pendek	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
Liabilitas jangka panjang		
Utang jangka panjang	XXXX	XXXX
Liabilitas imbalan kerja	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
Total Liabilitas Jangka Panjang	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
TOTAL LIABILITAS	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
ASET NETO		
Tanpa Pembatasan (without Restrictions)	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
Dari pemberi sumber daya		
Dengan Pembatasan (with Restrictions)		
Dari pembei sumber daya	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
TOTAL ASET NETO	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO	XXXX	XXXX

Sumber : (DE ISAK 35)

2. Laporan Penghasilan Komprehensif

Laporan Penghasilan Komprehensif menggambarkan kenaikan dan penurunan manfaat ekonomi entitas nonlaba yang berasal dari penerimaan atau pendapatan dan pengeluaran atau beban .

Tabel 2.5 Laporan Penghasilan Komprehensif

Entitas XYZ		
Laporan Penghasilan Komprehensif		
Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 20x2		
(Dalam Rp)		
	20X1	20X2
TANPA PEMBATAAN DARI PEMBERI		
SUMBER DAYA		
Pendapatan	XXXX	XXXX
Sumbangan	XXXX	XXXX
Jasa layanan	XXXX	XXXX
Penghasilan investasi jangka pendek	XXXX	XXXX
Penghasilan investasi jangka panjang	XXXX	XXXX
Lain- lain	XXXX	XXXX
Total Pendapatan	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
Beban		
Gaji, upah	XXXX	XXXX
Jasa dan profesional	XXXX	XXXX
Administratif	XXXX	XXXX
Depresiasi	XXXX	XXXX
Bunga	XXXX	XXXX
Lain- lain	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
Total Beban	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
Kerugian akibat kebakaran	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
Total Beban	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
Surplus (Defisit)	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
DENGAN PEMBATAAN DARI PEMBERI		
SUMBER DAYA		
Pendapatan		
Sumbangan		
Penghasilan investasi		

Tabel 2.6 Laporan Penghasilan Komprehensif (format A) lanjutan

jangka panjang	XXXX	XXXX
Total Pendapatan	XXXX	XXXX
Beban		
Kerugian akibat kebakaran	XXXX	XXXX
Surplus (Defisit)	XXXX	XXXX
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	XXXX	XXXX
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF	XXXX	XXXX

Sumber : (DE ISAK 35)

3. Laporan Perubahan Aset Neto

Dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan interpretasi standar akuntansi keuangan (ISAK 35) merupakan laporan perubahan aset neto menyajikan informasi aset neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya. Pada laporan perubahan aset neto entitas menyajikan informasi penghasilan komprehensif lain tersebut sesuai dengan kelas aset neto nya (misalnya jika penghasilan komprehensif lain berasal dari aset neto dengan pembatasan,maka disajikan dalam kelas aset neto dengan pembatasan.

Tabel 2.7 Laporan Perubahan Aset Neto

Entitas XYZ		
Laporan Perubahan Aset Neto		
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 desember 20x2		
(Dalam Rp)		
	20X1	20X2
ASET NETO TANPA PEMBATAAN DARI		
PEMBERI SUMBER DAYA		
Saldo awal	XXXX	XXXX
Surplus tahun berjalan	XXXX	XXXX
Surplus neto yang dibebankan dari pembatasan	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
Saldo akhir	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
Penghasilan Komprehensif Lain		
Saldo awal	XXXX	XXXX

Penghasilan komprehensif tahun berjalan	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
Saldo akhir	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
Total	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
ASET NETO DENGAN PEMBatasan DARI		
PEMBERI SUMBER DAYA		
Saldo awal	XXXX	XXXX
Surplus tahun berjalan	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan	(XXXX)	(XXXX)
Saldo akhir	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
TOTAL ASET NETO	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>

Sumber : (DE ISAK 35)

4. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas selama periode tertentu yang dikelompokkan dalam aktivitas operasional, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Laporan arus kas bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Metode pembuatan laporan arus kas terbagi dua yaitu laporan arus kas metode langsung dan laporan arus kas metode tidak langsung.

a) Laporan arus kas (metode langsung)

Laporan arus kas metode langsung adalah metode pembuatan laporan arus kas dimana informasi arus kas aktual ke alih informasi akrual dari komponen arus kas aktivitas operasional.

Tabel 2.8 Laporan Arus Kas (Metode Langsung)

Entitas XYZ		
Laporan Arus Kas		
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 desember 20x2		
(Dalam Rp)		
	20X1	20X2
AKTIVITAS OPERASI		
Kas dari sumbangan	XXXX	XXXX
Kas dari pendapatan jasa	XXXX	XXXX
Bunga yang di terima	XXXX	XXXX
Penerimaan lain-lain	XXXX	XXXX
Bunga yang dibayarkan	XXXX	XXXX
Kas yang dibayarkan kepada karyawan	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
Kas neto dari <i>aktivitas operasi</i>	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
AKTIVITAS INVESTASI		
Ganti rugi dari asuransi kebakaran	XXXX	XXXX
Pembelian peralatan	(XXXX)	(XXXX)
Penerimaan dari penjualan investasi	XXXX	XXXX
Pembelian investasi	(XXXX)	(XXXX)
<i>Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi</i>		
AKTIVITAS PENDANAAN		
<i>Penerimaan dari sumbangan yang dibatasi untuk :</i>	XXXX	XXXX
Investasi dalam dana abadi (<i>endowment</i>)		
Investasi bangunan	XXXX	XXXX
<i>Aktivitas pendanaan lain :</i>	XXXX	XXXX
Bunga dibatasi untuk reinvestasi	XXXX	XXXX
Pembayaran liabilitas jangka panjang	<u>(XXXX)</u>	<u>(XXXX)</u>
<i>Kas neto yang digunakan untuk pendanaanaktivitas</i>	<u>(XXXX)</u>	<u>(XXXX)</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>

DAN SETARA KAS	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>

Sumber : (DE ISAK 35)

b) Laporan arus kas metode tidak langsung

Laporan arus kas metode tidak langsung menghitung pergerakan arus kas dari aktivitas operasional dengan menggunakan informasi akuntansi akrual dan selalu dimulai dengan nilai laba bersih.

Tabel 2.9 Laporan Arus Kas (tidak langsung)

Entitas XYZ		
Laporan Arus Kas		
Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 20x2		
(Dalam Rp)		
	20X1	20X1
AKTIVITAS OPERASI		
Rekonsiliasi surplus (defisit) menjadi kas neto dari kas aktivitas operasi		
Surplus	XXXX	XXXX
Penyesuaian untuk :		
Depresiasi	XXXX	XXXX
Penurunan piutang bunga	XXXX	XXXX
Penurunan dalam utang jangka pendek	XXXX	XXXX
Penurunan dalam pendapatan diterima dimuka	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
<i>Kas neto dari aktivitas operasi</i>	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
AKTIVITAS INVESTASI		
Ganti rugi dari asuransi kebakaran	XXXX	XXXX
Pembelian Peralatan	XXXX	XXXX
Penerimaan dari penjualan investasi	XXXX	XXXX
Pembelian investasi	XXXX	XXXX

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	XXXX	XXXX
AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan dari sumbangan yang dibatasi untuk :		
Investasi dalam dana abadi (<i>endowment</i>)	XXXX	XXXX

Tabel 2.10 Laporan Arus Kas tidak langsung (Lanjutan)

Investasi bangunan	XXXX	XXXX
<i>Aktivitas pendanaan lain :</i>		
Bunga dibatasi untuk reinvestasi	(XXXX)	(XXXX)
Pembayaran liabilitas jangka panjang	(XXXX)	(XXXX)
<i>Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan</i>	(XXXX)	(XXXX)
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS		
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>

Sumber : (DE ISAK 35)

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan di atas. Bertujuan memberikan informasi tambahan tentang perkiraan-perkiraan yang dinyatakan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini berupa perincian dari suatu perkiraan yang disajikan seperti misalnya aset tetap. Catatan atas laporan keuangan memberikan rincian nama aset, liabilitas, aset neto. Misalnya, untuk aset tetap di catatan atas laporan keuangan

akan dijelaskan untuk menghitung penyusutan aset tetap, serta kebijakan akuntansi lainnya yang digunakan oleh entitas tersebut.

2.6 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan judul penelitian yang di ambil penulis terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dan dapat mendukung penelitian yang sekarang serta dapat diajukan beban acuan antara lain :

Tabel 2.11
Hasil Penelitian Terdahulu

NO	Peneliti / Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Rio Naldi Bratanata, 2022	Analisis Penerapan Akutansi Keuangan Pada Yayasan Pendidikan Lirik Di Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu	Jenis penelitian ini studi kasus dengan menggunakan metode penelitian kualitatif	Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi dengan prinsip Akuntansi Berterima Umum pada Yayasan Pendidikan Lirik di Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu. Data yang di kumpulkan merupakan data primer atau skunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan dokumentasi.
2.	Siti Nurhafni ,2019	Analisis Penerapan Akutani Pada Yayasan Pendidikan SMA Budi Dharma Di Kota Dumai	Jenis penelitian ini studi kasus dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif	Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Yayasan Pendidikan SMA Budi Dharma di Kota DUMAI dalam proses pencatatan akuntansi yayasan tidak membuat jurnal untuk setiap transaksi.

				<p>Sementara dalam menyusun Laporan Keuangan yang disusun atau disajikan oleh Yayasan Pendidikan SMA Budi Dharma di kota Dumai hanya laporan Neraca dan laporan Laba-Rugi dan tidak menyusun laporan Posisi Keuangan, laporan Aktivitas,</p>
3	RirinOktaviani, (2019)	Analisis Penerapan Akutansi PadaYayasan SD IT AL Hidayah Di Kota Pekan	Jenis penelitian ini studi kasus dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif	<p>Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dasar pencatatan yang diterapkan di Yayasan SDIT Al Hidayah Pekanbaru adalah menggunakan basis kas. Siklus akuntansi pada Yayasan SDIT Al Hidayah Pekanbaru belum lengkap dan belum berurutan sesuai dengan standar yang berlaku. Laporan keuangan yang dibuat adalah Laporan Aktivitas dan Laporan Posisi Keuangan namun belum membuat laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Penerapan akuntansi pada Yayasan SD IT Al Hidayah Pekanbaru belum sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum.'</p>

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian ini adalah Akutansi keuangan dan laporan keuangan yayasan pada Yayasan Pendidikan HKBP Sidorame Medan yang beralamatkan Jl.Dorowati No.40, SidorameBar.II,Kec.Medan Perjuangan ,Kota Medan,Sumatera Utara 20236

3.2 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara terstruktur dengan pihak terkait dari Yayasan.

Menurut Sugiyono (2019:456) Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.Pendidikan HKBP Si dorame Medan untuk mengumpulkan informasi.

- b. Data sekunder digunakan dalam memperoleh segala data yang berkaitan tentang Yayasan Pendidikan HKBP Sidorame Medan .

Sedangkan data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak lansung melalui media perantara.

Menurut Sugiyono (2018:456) data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen

2. Sumber Data

Sumber data adalah hasil wawancara dan subjek dari dokumentasi berupa catatan keuangan dan laporan keuangan tersebut dengan pihak yayasan Pendidikan HKBP Sidorame Medan .

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan dengan dua cara sebagai berikut:

1. Wawancara yaitu merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan Tanya Jawab secara langsung dengan pihak yang berkompeten dalam yayasan yang mengetahui tentang permasalahan yang diangkat oleh penulis guna memperoleh informasi yang akurat sehubungan dengan penerapan akuntansi yayasan. Wawancara dilakukan dengan bagian keuangan dan pimpinan yayasan.

Menurut Yusuf (2014:372) Wawancara adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi secara langsung atau bertanya secara langsung mengenai suatu objek yang diteliti.

2. Dokumentasi yaitu merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa data sekunder sehubungan dengan penerapan akuntansi keuangan yayasan yang diterapkan dalam Pendidikan HKBP Sidorame Medan seperti : laporan keuangan, sejarah berdirinya yayasan, dan sebagainya.

Sugiyono (2018:476) Menyatakan bahwa “ dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

3.4 Teknik Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Metode analisis deskriptif

Metode analisis deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran. Metode analisis ini dilakukan dengan cara menentukan dan mengumpulkan data yang diperoleh sehingga memberikan keterangan jelas dan akhirnya menarik kesimpulan yang umum mengenai penerapan pelaporan keuangan pada yayasan pendidikan.

2. Metode analisis deduktif

Metode analisis deduktif merupakan metode ilmiah untuk membuat suatu kesimpulan dari data yang diperoleh berdasarkan kebenaran yang telah berlaku umum untuk mengatasi masalah yang dihadapi yayasan. Dengan demikian dapat dibuat kesimpulan serta mengemukakan saran untuk mengatasi masalah pelaporan keuangan pada yayasan pendidikan